



2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2020

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LKJIP-2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan



H.M. Yadi Robyan Noor, S.E., M.TP

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 196207211988111001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
c. Struktur Organisasi	3
d. Sumber Daya Manusia	6
e. Aspek Strategis Organisasi	7
f. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2020	8
g. Sarana dan Prasarana Kerja	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
a. Perencanaan Strategis	23
b. Indikator Kinerja Utama	26
c. Perjanjian Kinerja	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
c. Analisis Capaian Kinerja	37
d. Realisasi Anggaran	55
BAB IV. PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;

- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai :

Fungsi :

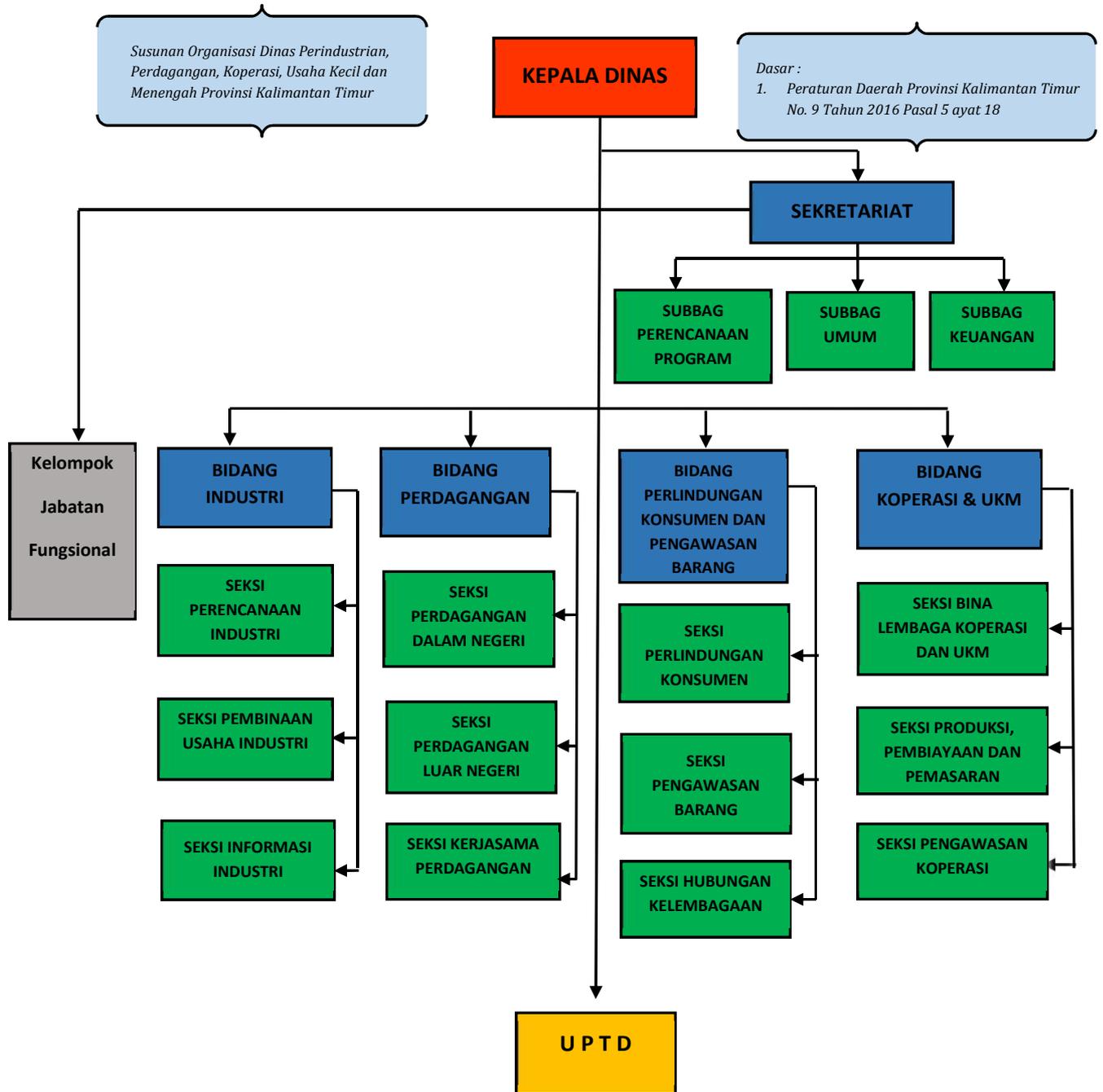
- a) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

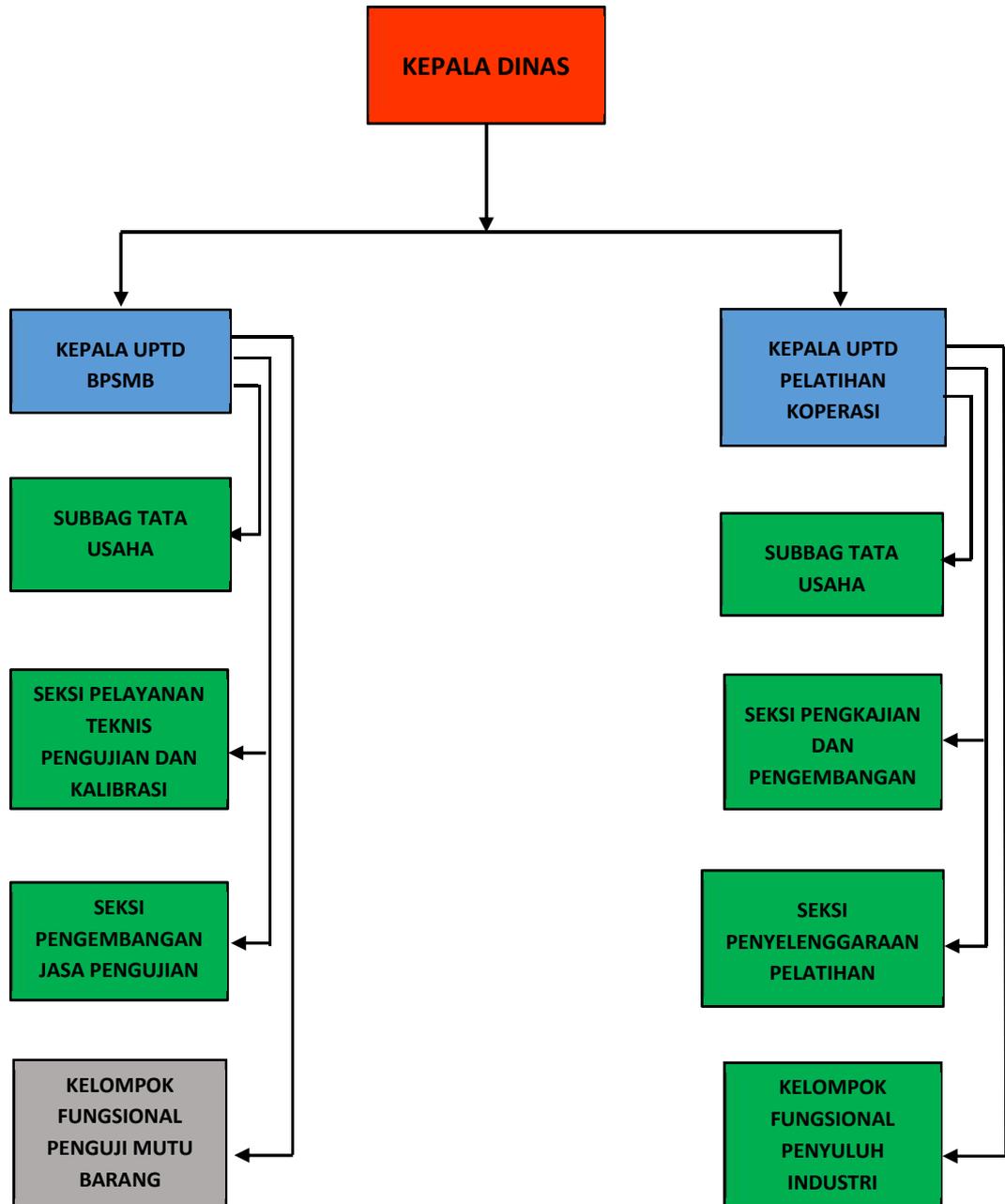
C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2020, memiliki jumlah pegawai 90 orang yang dirasa masih banyak memerlukan tambahan pegawai dikarenakan banyaknya pegawai yang purna tugas. Rincian keadaan pegawai sebagaimana dalam tabel 1.1.

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 12,00% berpendidikan S2 dan 42,00% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 11,00% dan 31,00% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 74,00% adalah Penata dan 13,00% adalah Pembina sedangkan sisanya 13,00% Pengatur.

**Tabel 1.1 Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim
Per 30 Desember 2020**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Srjn
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	12	6	-	4	13	1	-	1	6	3	6	2
Bid. Industri	8	5	-	1	9	3	1	-	2	-	7	3
Bid. PKPB	6	3	-	1	7	1	-	-	1	1	7	-
Bid. Perdagangan	7	5	-	-	10	2	-	-	6	1	3	2
Bid. Koperasi	7	1	-	-	8	-	-	-	3	1	4	-
UPTD BPSMB	10	9	1	3	13	2	1	-	7	4	5	2

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Srjn
UPTD Pelkop	8	2	-	3	5	2			4	-	5	1

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik.

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan.

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima.

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) TAHUN 2020.

1. Sektor Industri

Pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yang sangat luas juga memiliki sumber daya alam *renewable* yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan serta dilakukan hilirisasi industrinya diantaranya :

Perkembangan Luas (ha) dan Produksi (ton) Perkebunan Kalimantan Timur, 2017-2019

Komoditi	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Karet			
Luas	115 160	115 082	118 638
Produksi	63 510	57 569	52 817
Kelapa Sawit*)			
Luas	1 192 342	1 199 407	1 227 665
Produksi	13 164 310	13 398 363	18 343 852

*) Satuan dalam TBS, bukan CPO

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Rumah tangga Perikanan Kalimantan Timur, 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan Tangkap			
Perikanan Laut	44 547	28 007*	28 085
Perikanan Darat	45 529	22 513*	21 755
Jumlah	90 076	50 520*	49 840
Perikanan Budidaya			
Tambak/Air Payau	14 609	14 849	15 420
Kolam/Air Tawar	11 750	9 513	14 229
Karamba	10 953	10 589	10 642
Sawah	16	16	54
Budidaya Pantai/ Laut	1 167	926	1 019
Jumlah	38 495	35 893	41 364

*) revisi

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur, 2017-2019

Produksi	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Minyak Bumi (ribu barel)	29 754,98	23 717,95	20 829,80
Gas Bumi (ribu MMBTU)	449 579,20	296 832,49	240 828,16
Batubara (ribu ton)	251 320,89	257 143,93	228 979,57*

*) data PDRB ADHB Pertambangan batubara dan lignit

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batu bara sekiranya apabila sumbangan komoditi ini berkurang akan berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur, sehingga harus mencari dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih riil dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Banyak potensi yang dimiliki yang belum tergarap secara maksimal yakni pertanian, perkebunan,

perikanan, laut, pariwisata, produk kerajinan tradisional, UMKM, dan industri lainnya.

Namun, proses transformasi ini dinilai masih lambat karena permasalahan yang kompleks yakni dari koordinasi tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor industri berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri masih belum optimal, baik dalam hal teknologi, ketersediaan lahan, jaminan ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja luar.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, terdapat lima permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia industri.
- 3) Rendahnya komitmen dan respon stake holder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah.

- 4) Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
- 5) Kelembagaan belum efektif.

2. Sektor Perdagangan.

Sektor perdagangan Kalimantan Timur tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Terbatasnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi komoditi non migas dan non batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kalimantan Timur. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kalimantan Timur memiliki potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sektor perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim, misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor hulu sebagai bahan baku industri, meningkatkan investasi di Kaltim dan lain-lain.

b. Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan.

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan

biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk bersama-sama bersinergi mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Belum optimalnya pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.

Beberapa fasilitas infrastruktur yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan export langsung, masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor. Hal ini diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Dimana Pemerintah Kabupaten Kota belum semua memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

d. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor.

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Terbatasnya promosi dalam

dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

e. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok.

Kebutuhan pokok masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi sebuah Negara. Ketersediaan barang kebutuhan pokok yang harganya tinggi dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi, dan berbagai gejolak sosial.

Dalam memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur, sebagian besar barang kebutuhan pokok tersebut masih di datangkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Tingginya ketergantungan distribusi barang kebutuhan pokok tersebut menyebabkan disparitas harga dan memerlukan efisiensi perdagangan melalui kelancaran arus distribusi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga kondisi kebutuhan pokok dan barang penting ini dalam 3 (tiga) hal, antara lain *ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga* terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dimana barang kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga.

f. Belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan.

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai

distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar provinsi. Data ketersediaan atau stok komoditas belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas.

g. Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

h. Konsumen Kalimantan Timur pada umumnya masih pada tahap mampu belum kritis.

Masih banyak masyarakat Kaltim yang belum mengetahui dan paham adanya undang-undang perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen. Sehingga apabila dilapangan ada persoalan, belum bisa melakukan penyelesaian dengan benar sesuai aturan. Indeks Keberdayaan Konsumen di definisikan sebagai keadaan subjektif konsumen yang terampil, tahu undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen, aktif mencari informasi serta menegaskan hanya dengan mengajukan komplain.

i. Belum adanya peran aktif masyarakat menggunakan hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Kalimantan Timur tahun 2020 adalah 51,30 (IKK : 40,1 – 60,00 ; Mampu), yang berarti konsumen kaltim sudah tahu keberadaan undang-undang perlindungan konsumen No. 81 tahun 1999, sudah menggunakan hak dan kewajibannya untuk mencari informasi dan menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tetapi konsumen kaltim belum pada taraf kritis (IKK : 60,1 – 80,0 ; Kritis), yaitu berperan aktif memperjuangkan hak bila merasa dirugikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas serta mengutamakan produk dalam negeri di dalam kebudayaan sehari-hari. Kebudayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

j. Pelaku Usaha masih ada yang belum patuh.

Dari hasil pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Timur, ditemukan masih ada pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktifitas usahanya secara profesional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.

k. Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab XI pasal yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah terbentuk di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

Tahun 2020 BPSK Kota Samarinda hanya menerima 9 (sembilan) pengaduan konsumen dan 5 (lima) saksi ahli. Sedangkan BPSK Kabupaten Berau tidak ada pengaduan, sehingga anggota BPSK Kabupaten Berau melakukan pengawasan bersama Dinas Perdagangan setempat.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, konsumen belum optimal memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

I. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang baik tenaga teknis laboratoris (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun tenaga administratif (Pelaksana) belum sesuai dibandingkan beban kerja yang ada. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan :

- 1) Perekrutan Tenaga Non PNS baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga non teknis.
- 2) Analisis Beban Kerja untuk mengusulkan tenaga CPNS agar beban kerja yang ada dapat dilaksanakan oleh SDM PNS sesuai tugas dan fungsinya.

n. Belum Optimalnya pemanfaatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi.

- 1) Pelayanan Pengujian.

Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelanggan dikarenakan :

- Ruang lingkup yang telah diakreditasi terhadap Laboratorium Pengujian seperti komoditi Lada Putih dan Biji Kakau

langsung dijual antar pulau oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan mutu komoditi.

Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil identifikasi potensi layanan pengujian di sentra Komoditi Lada Putih dan Biji Kakao di kabupaten Kukar, Kutim dan PPU.

Mou pemerintah

- Pelaku Usaha produk Crude Palm Oil (CPO) menginginkan UPTD BPSMB dapat memberikan pelayanan bukan hanya sebagai laboratorium pengujian tetapi dapat sebagai Lembaga Surveyor, Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil Pertemuan Teknis yang diprakarsai oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Pelaku Usaha CPO yang dilaksanakan di Samarinda tahun 2018.
- Mengembangkan ruang lingkup pengujian lain dan akreditasinya yang disesuaikan dengan permintaan potensi pasar antara lain : Beras dan Minyak Goreng.

2) Pelayanan Kalibrasi.

Ada beberapa ruang lingkup dan kapasitas yang belum dikembangkan akreditasinya sesuai permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pemerintah maupun swasta diperlukan akreditasi terhadap ruang lingkup anatara lain : Thermohygrometer, Tekanan, Gaya dan Aliran.

4. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

a. Rendahnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh Koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Namun, dengan adanya

Pandemi Covid – 19 saat ini tentu mengganggu pelaksanaan RAT, terkendala oleh Peraturan Pembatasan Pertemuan dengan mengundang orang banyak. Padahal solusi RAT Koperasi masih mungkin dilaksanakan dan sudah diatur oleh Pemerintah. Banyaknya Koperasi masih belum mengetahui peraturan tentang RAT bisa dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

b. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi.

Pengurus adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusan-keputusan rapat anggota, anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), Undang – undang perkoperasian dan peraturan – peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi. Dalam pelaksanaannya, pengurus dalam menjalankan tugas masih belum patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, berakibat adanya konflik antara pengurus dengan anggota.

c. Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap UKM.

Semenjak Covid – 19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestic dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keterpengaruhan terhadap UMKM dapat dilihat dari indikator : turunnya omset penjualan, sulitnya mendapatkan modal, sulit mengakses bahan baku produksi.

UKM berperan sebagai roda penggerak roda ekonomi yang sangat cepat. Secara mikro ekonomi, keberadaan UKM sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat

sulit untuk mandiri, untuk itu diperlukan secara terus menerus pendataan UKM by name by address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM dalam menghadapi dampak pandemic Covid – 19, maka perkembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk mengakses pasar secara online dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestic, nasional dan internasional.

SDM.

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat			
Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	1 Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB(%)	Pengembangan industri diarahkan pada potensi sumber daya alam yang berbasis komoditi Kelapa Sawit, Kayu, dan Karet melalui pengembangan kawasan dan sentra, serta regulasi yang mendorong pengembangan industri;
			Peningkatan pengembangan industry kecil menengah diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta dukungan semua pihak;
			Peningkatan kompetensi SDM diarahkan pada program kesesuaian kebutuhan, melalui pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama perusahaan yang membutuhkan;
			Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus akan diarahkan pada upaya hilirisasi melalui percepatan penataan kelembagaan, SDM, dan Infrastruktur dan secara simultan mendorong pemungisian peran kawasan industri;
			Pengembangan kelembagaan industri diarahkan pada terpenuhinya dukungan regulasi, pelayanan perizinan, dan kebutuhan investasi;
			Peningkatan standardisasi produk diarahkan pada upaya penerapan dan pengawasan, serta pembinaan

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			kepada IKM;	
	2 Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan ekspor komoditi dan produk non migas dan batubara diarahkan kepada peningkatan daya saing, optimasi peran Direct Call dan perluasan pemasaran produk export;	
		Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan kerjasama perdagangan diarahkan pada kerjasama antar daerah, pengembangan mitra bisnis, dan pengembangan pelaku produk export;	
		Mewujudkan sistem distribusi yang efisien		Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah
				pengembangan akses dan logistic penerapan harga acuan, penataan perdagangan
			peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting	
	3 Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Menurunnya peredaran barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai ketentuan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen	
			pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;	
2 Meningkatkan ekonomi kerakyatan	4 Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi	Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan UKM yang berdaya saing mandiri dan sehat untuk pertumbuhan perekonomian	Pengkatan Kelembagaan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya peningkatan Jumlah RAT, peningkatan keterpaduan, pembinaan dan pengawasan, serta pelatihan manajemen;	
			Peningkatan kompetensi wirausahawan diarahkan pada peningkatan kapasitas UKM melalui pelatihan dan pendidikan;	
			Peningkatan kemandirian UKM diarahkan pada pembentukan usaha kecil menengah menengah yang	

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		daerah	kondusif melalui penguatan, optimasi pemanfaatan akses permodalan, pendampingan, pengelolaan dan legalitas formal dan perlindungan
			Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi;

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	29.767	m ²
2	Bangunan Gedung	7.617	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	7	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur 2019-2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang dalam peningkatan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategik dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi pula dengan target tahunannya disampaikan pada tabel terlampir:

Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2020	Target Sasaran Kinerja tahun			
						2020	2021	2022	2023
						8	9	10	11
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah terhadap PDRB	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	persen	18,90	20%	20%	21%	21%
		Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas (Milyar dollar)	milyar	11,83	15.2 m USD	15.9 m USD	16.7 m USD	17.6m USD
			Disparitas harga antar wilayah (%)	persen	16.40%	20%	20%	19%	19%
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51.3	33	36	39	42
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	koperasi	43	10	10	10	10
			UKM Unggulan	UKM	60	30	35	40	45
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	4,50*	4,60	4,70	4,80	4,90	

Ket : * Data Sementara.

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Perencanaan Pembangunan Industri
						Pengembangan dan Pembinaan Industri
						Pengembangan Informasi Industri
		Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas	milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Perdagangan Luar Negeri
			Disparitas harga antar wilayah (%)	persen		Perdagangan Dalam Negeri
			Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai		Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM
			UKM Unggulan	UKM		Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa
			Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	2. Nilai Ekspor Non Migas	BPS dan Bank Indonesia	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
		3. Disparitas Harga Antar Wilayah	Harga di Provinsi / Harga Kab./ Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Survey Keberdayaan Konsumen Kalimantan Timur	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	5. Koperasi Unggulan	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	SKPD terkait, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		6	UKM Unggulan	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan.	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas
		7	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Berdasarkan data BPS	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Prov dan Kabupaten/ Kota	Kepala Dinas

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai Ekspor Non Migas	Milyar US\$	14.5
		Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	20
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	33
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10
		UKM Unggulan	UKM	30
		Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Persen	4,60

1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp 62.477.814.560,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp18.294.032.000,- dan Belanja Langsung Rp 44.183.782.560,-. Pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan refocusing anggaran 2020 sehingga mengalami perubahan APBD menjadi sebesar **Rp. 46.969.715.009** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 18.294.032.000,- dan Belanja Langsung Rp. 41.657.215.009,- dan mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD sebesar **Rp 43.879.403.822,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 19.119.032.000 dan Belanja Langsung Rp 24.760.371.822,- Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp 36.859.047.286 (89,93%)** dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 13.922.535.056,- (80,00%) dan Belanja Langsung (BL) Rp. 29.097.699.620,- (99,87 %).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	19.119.032.000	13.858.411.111	80,00
2	Belanja Langsung	24.760.371.822	23.000.636.174,80	72,48
	Jumlah	50.424.740.716	43.020.234.676	84,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	2.290.825.000	14,69 %	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	4.922.636.988	31,56 %	
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	987.070.000	6,33 %	
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	7.397.104.668	47,42 %	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,32	24,14
2	Pengukuran Kinerja	25%	21,25	18,44
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,31	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,03	5,12
5	Capaian Kinerja	20%	12,88	12,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	74,79	70,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja		
	a. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan dokumen Renstra review secara berkala.	Melakukan evaluasi setiap 2 bulan terkait Renja maupun Renstra dan juga melaksanakan Review Renstra.	Melaksanakan kegiatan Rapat evaluasi renja dan Renstra serta Review Renstra sebagaimana dianggarkan dalam DPA dalam tahun 2021.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	b. Rencana aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara berkala serta rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan perorganisasian kegiatan.	Melaksanakan monitor atas pencapaian kinerja.	Melaksanakan kegiatan Rapat evaluasi renja dan Renstra serta Review Renstra sebagaimana dianggarkan dalam DPA dalam tahun 2021.
Pengukuran Kinerja			
	a. Kualitas pengukuran agar lebih ditingkatkan lagi. Antara lain : pengumpulan data kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan.	Melakukan perbaikan terkait kualitas pengukuran, terutama terhadap kehandalan data kinerja.	Melakukan koordinasi lebih intens dengan bidang dan UPTD terkait ketepatan dan kehandalan data capaian kinerja.
	b. Implementasi pengukuran agar ditingkatkan lagi. Antara lain : IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, Hasil pengukuran dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishmen, Melakukan IKU secara berkala, Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.	Telah dan akan ditingkatkan dilakukan implementasi hasil pengukuran.	Diberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi tahun 2020 dan atas arahan kadis akan terus dilakukan di tahun - tahun mendatang.
Pelaporan Kinerja			
a.	Penyajian informasi kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan.	Meningkatkan ketersediaan data dukung yang dapat diandalkan.	Melakukan koordinasi lebih awal dengan bidang/UPTD terkait ketersediaan data handal.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	<p>Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki program dan kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja, serta digunakan untuk penilaian kinerja.</p>	<p>Meningkatkan penggunaan informasi kinerja dalam perbaikan perencanaan.</p>	<p>Mengadakan rapat secara rutin yang membahas masalah penyusunan dokumen perencanaan.</p>
3	Evaluasi Internal		
	<p>a. Agar meningkatkan kualitas evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi tersebut yang telah dilakukan.</p> <p>Meningkatkan kualitas pemantauan rencana aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan kinerja.</p> <p>Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan dalam</p>	<p>Melakukan perbaikan evaluasi baik hasil dari evaluasi maupun peningkatan volume pelaksanaan evaluasi.</p> <p>Meningkatkan kualitas pemantauan rencana aksi dan menggunakannya untuk memberikan alternatif perbaikan kinerja.</p> <p>Menindaklanjuti perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.</p>	<p>Tahun 2021 telah dianggarkan dalam RKA sebanyak 4 kali pelaksanaan evaluasi rencana aksi atas kegiatan, dimana tahun sebelumnya hanya dilaksanakan satu kali.</p> <p>Sejak tahun 2020 telah ditingkatkan pelaksanaan monev kegiatan, baik melalui pendampingan langsung maupun monev ke aparat kabupaten/kota sebagai pihak ketiga dalam monev ini.</p> <p>Tahun 2021 akan dilakukan monev untuk mengetahui adanya perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.</p>
4.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi		
	<p>Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi dapat diandalkan.</p>	<p>Tahun 2021 diharapkan pandemi sudah berlalu sehingga dapat lebih maksimal pencapaian kinerja output maupun outcome.</p>	<p>Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian output dan outcome akan meningkat.</p>

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	0	0	0	20	18.90%	94,5
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan dan koordinasi</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan										94,5
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar	14.50	0	0	0	14.50	11.83	81.59
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	0	0	0	20	16.40%	121,95
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan, koordinasi dan promosi, pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas										142,56
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	30	0	0	0	30	51.3	155,45
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen										128
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10	0	0	0	10	43	430
		UKM Unggulan	UKM	30	0	0	0	30	60	200
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Persen	4.6	0	0	0	0	4.5*	97,83
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM										242,61
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :			149,69							

C. Analisis Capaian Kinerja 2020

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2020 implementasinya mencakup pelaksanaan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dalam 16 (enam belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2020, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan
Dengan Indikator	:	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2020 ini adalah 20%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 18,90%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 94,50% .

□ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas
Dengan Indikator	:	1. Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Dollar) 2. Disparitas Harga Antar Wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2020 ini adalah untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ 14.5 Milyar Dollar dan realisasi ekspor non migas sebesar US\$ 11.83 Milyar Dollar, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 81,59%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran

sebesar 16.40%, sehingga persentase pencapaian indikator sarasannya sebesar 121,95%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota **semakin kecil** maka pencapaian semakin baik.

❑ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2020 adalah dengan nilai 33 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 51.3, sehingga pencapaian indikator sarasannya sebesar 155,45 persen.

❑ Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi
Dengan Indikator	:	1. Koperasi Unggulan 2. UKM Unggulan 3. Persentase sumbangan Koperasi dan UKM terhadap PDRB

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2020 adalah untuk indikator Koperasi Unggulan sebesar 10 Koperasi dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 43 Koperasi sehingga persentase pencapaian sarasannya sebesar 430 persen. Untuk indikator UKM Unggulan sebesar 30 UKM dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 60 UKM, sehingga persentase pencapaian indikator sarasannya sebesar 200 persen. Dan untuk Indikator Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap PDRB ditargetkan 4,6%, namun realisasinya 4,5%* (angka sementara), sehingga capainnya sebesar 97,83%.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Timur pada tahun anggaran 2020 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 16 (enam belas) program, maupun dari sumber dana APBN/Dana Dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	18,90	94,50
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar USD	14,5	11,83	81,59
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	16,40	82
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	33	51,3	155,45
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10	43	430
		UKM Unggulan	UKM	30	60	200
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%	4,6	4,5*	97,83
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :				149,69		

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2020) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan tahun terakhir 2019;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019 dan 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2018	2019	2020	Tahun 2020
1	2	3	5	6	7	$8 = (7-6) / 6 * 100\%$
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	18,44	17,77	18,90	0,06
2	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	6	0	0	0
3	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	13.79	14.11	11,83	-0,16
4	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	7	13,80	16,40	0,19
5	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	11	0	0	0
6	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	nilai	0	38.4	51,3	0,34
7	Jumlah Koperasi Unggulan.	koperasi	61	16	34	1,13
8	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	68.85	0	0	0
9	UKM Unggulan	UKM	0	41	60	0.00
10	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	12.83	4,5	4,5*	0
11	UKM yang Melaksanakan Kontak Dagang	UKM	210	0	0	0
12	Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/ukm	407	-	-	0
13	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1459	0	0	0
14	Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	325	0	0	0

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2020) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target jangka Menengah s.d 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21	18,90	-10,0
2	Nilai Ekspor non Migas	Milyar USD	17.6	11,83	-32,78
3	Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	19	16,40	-13,68
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	42	51,3	22,14
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	50	43	-14,00
6	UKM Unggulan	UKM	45	60	33,33
7	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB.	persen	4.9	4,5*	-6,25

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket.
			2020		(+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	18,90	19,87 (TW. II)	+
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ M	11,83	111,25	-
3	Disparitas Harga antar Wilayah	Persen	16,40	5,642%	Disparitas harga rata-rata Kaltim dibandingkan dengan Harga rata-rata Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51,3	49,07	-
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	43	-	
6	UKM Unggulan	UKM	60	-	
6	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	4,5*	5,1 (PDB Koperasi)	-

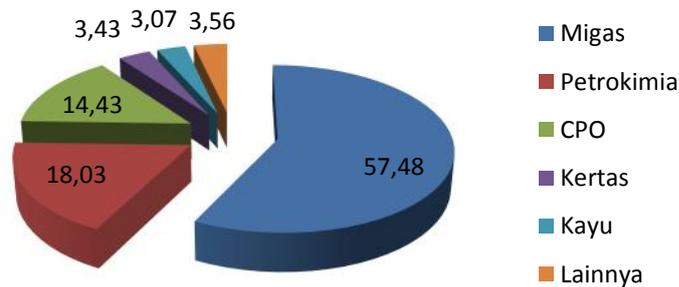
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. **Sasaran I** : Peningkatan kontribusi lapangan industri pengolahan.

Secara tahunan Industri Pengolahan berkontraksi sebesar 5,35% (yoy) membaik dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,74% (yoy). Pemulihan sudah mulai ditunjukkan dalam

pertumbuhan triwulanannya, dimana secara triwulanan Industri Pengolahan mampu tumbuh positif sebesar 4,3% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 10,6% (qtq). Perbaikan kinerja industri pengolahan tersebut salah satunya bersumber dari aktivitas produksi kilang minyak Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan yang kembali beroperasi setelah mengalami penutupan sementara pada April-Mei 2020. Lebih lanjut, sub kategori industri pengilangan migas berkontribusi sebesar 57,48% terhadap PDRB Industri Pengolahan Kaltim sehingga perbaikan yang terjadi pada kinerja industri pengilangan migas akan langsung mendorong perbaikan kinerja industri pengolahan secara keseluruhan.

Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori



Sumber: Bank Indonesia Kalimantan Timur

Pada triwulan III 2020 volume pengiriman BBM tercatat berada di level yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar 15,74% (qtq). Pertamina RU V Balikpapan sendiri merupakan pemasok utama BBM di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan aktivitas pengiriman antar daerah juga terjadi untuk komoditas biodiesel yang pada triwulan III 2020 telah disalurkan 20.335 ton biodiesel dari Kaltim, lebih tinggi dibandingkan penyaluran periode sebelumnya sebesar 11,294 ton. Di Kaltim sendiri terdapat salah satu pemasok utama biodiesel

utama untuk Pulau Kalimantan dan sekitarnya, yakni PT Kutai Refinery Nusantara.

Indeks produksi methanol Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,94% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 23,57% (yoy). Peningkatan produksi methanol tersebut disebabkan oleh telah kembali meningkatnya produksi setelah triwulan sebelumnya sempat sedikit terkendala karena merebaknya pandemi. Selain itu, peningkatan tersebut juga ditujukan untuk mempercepat realisasi produksi tahun 2020 mengingat di akhir 2020 nanti akan dilakukan pemeliharaan pabrik secara rutin. Di sisi lain, kinerja industri petrokimia lainnya, yakni industri pupuk, mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks produksi pupuk Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,12% (yoy). Kontraksi yang lebih dalam tersebut disebabkan oleh adanya pemeliharaan rutin pabrik pupuk di Kaltim pada triwulan III 2020 sehingga produksi mengalami penurunan.

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan target 20 %, sampai dengan triwulan ke IV 2020 realisasi capaian 18,90 % (y-on-y), berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 94,50%. Namun peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 57,48 % untuk migas, 42,52 % untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur yang berbasis sumber daya alam renewable belum optimal.

- b. **Sasaran II** : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas.

Memiliki 2 indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dan Disparitas Harga Antar Wilayah, dimana Indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dengan pencapaian terhadap target tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar 81,59% dengan nilai ekspor 11,83 milyar US Dolar. Turunnya nilai ekspor non migas ini disebabkan oleh karena adanya wabah Virus Corona yang melanda dunia. Sehingga banyak negara tujuan ekspor yang mengurangi permintaan komoditi non migas di pasar ekspor yaitu China, India, Philipina dan Jepang sebagai negara tujuan utama ekspor non migas Kaltim di tahun 2020.

Untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 16,40%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 82.00% (persentase semakin kecil semakin baik). Sehingga dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya diperlukan upaya program untuk mencari peluang pasar tujuan ekspor baru dan upaya diversifikasi komoditi/produk non migas Kaltim.

c. **Sasaran III** : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).

Terjadinya peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mencapai kinerja 150.88 persen. Hal ini tentunya dampak dari meningkatnya pengetahuan dan wawasan para konsumen di Kalimantan Timur, yang mana di tahun 2019 dilakukan kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan komunitas di 6 Kab/Kota. Sebanyak 1.000 konsumen.

Sedangkan tahun 2020 Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan ASN di 3 Kab/Kota sebanyak 600 konsumen. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan pengawasan Barang dan Jasa di 10

Kab/Kota serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian mediasi berbagai pengaduan sengketa konsumen. Seterusnya terbukanya berbagai sumber informasi pembudayaan konsumen melalui kegiatan talk show di TVRI, RRI dan Media Cetak (Koran).

- d. **Sasaran IV** : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

Dengan 3 indikator sasaran yaitu Koperasi Unggulan, UKM Unggulan dan Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB. Untuk indikator sasaran Koperasi Unggulan jumlah Koperasi Unggulan di Kalimantan Timur untuk tahun 2020 ini kondisinya menaik, dimana pencapaiannya sebesar 430%. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 milyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar, telah diaudit oleh auditor independen. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi, manajemen kepada pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

Sedangkan untuk indikator sasaran UKM Unggulan dengan pencapaian mencapai 200%, mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kalimantan Timur, hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor Koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.

Indikator sasaran Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2020 mencapai 4,5%*, dengan pencapaian

terhadap target yang ditetapkan 4,6% adalah 97,83%*. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga berperan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, mengingat jumlah usaha di Kalimantan Timur mencapai 307.238 unit dan sebagian besar 97,61% adalah KUKM.

- e. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2020 sebanyak 20 orang dengan target 25 orang dan capaiannya adalah hanya 80%. Pencapaian kinerja tersebut terkendala dengan adanya aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2020 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Untuk pelayanan publik terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.
- g. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2020 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang didalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan industri diarahkan pada pengolahan sumber daya alam terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur, komoditi unggulan Kalimantan Timur adalah sawit, karet, kayu, rumput laut, udang, ikan dan gas alam dalam industri unggulan hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan.

Untuk menunjang pembangunan industri diatas maka pada tahun 2020 bidang industri mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri
- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri
- Kegiatan Pengembangan Informasi Industri

b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

Untuk menunjang sasaran diatas maka pada tahun 2020 bidang Perdagangan mempunyai 3 program dan 6 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan
2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
 - Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan
3. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
 - membangun jejaring dengan eksportir.
 - Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.

Melalui program kegiatan tersebut telah dilakukan beberapa upaya untuk pencapaian target indikator kinerja, yaitu :

Koordinasi dengan pelaku usaha, pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

Mengoptimalkan forum kerjasama perdagangan dalam upaya ketercukupan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim.

Melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar, monitoring harga dan stok bapokting dan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.

Mendorong peningkatan ekspor non migas non batubara melalui koordinasi dengan semua stake holder terkait dalam bentuk mencari informasi peluang pasar ekspor, pengumpulan data komoditi potensial ekspor dan mendorong penciptaan dan pendataan eksportir dan calon eksportir baru.

Fasilitas akses pasar luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang, business matching, forum kerjasama perdagangan dan business matching dengan buyer luar negeri.

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.

- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota melalui edukasi.
- b. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan atau jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan atau jasa di beberapa kabupaten/kota.
- d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2020 bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

- Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.
- Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa.
- koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

d. Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi.

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2020 mempunyai 1 program dan 4 kegiatan yaitu :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
 - Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi
 - Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM
 - Produksi Pembiayaan dan Pemasaran
 - Pengawasan Koperasi

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten / kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten / kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten / kota.
- Meningkatkan usaha pendampingan yang dilakukan Klinik Bisnis Koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.

- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha, pemasaran, dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat / bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program / kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten / kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam Online Data System (ODS) agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten / Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara

pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang diberikan oleh perusahaan besar melalui pola CSR atau kemitraan dalam melakukan usaha seperti koperasi perkebunan dengan perusahaan kelapa sawit.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 7 (tujuh) indikator dengan capaian rata-rata diatas 100%. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Persentase UKM Unggulan dengan tingkat efisiensi mencapai 111,34% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Nilai ekspor non migas, yaitu minus -15,15%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	94,50	96,69	-2,19
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	81,59	97,10	-15,15
		Disparitas harga antar wilayah	121,95	98,11	23,84
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	155,5	96,33	59,17
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	430	88,66	341,34
		UKM Unggulan	200	88,66	111,34
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	97,83*	88,66	9,17

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persen tase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang Dialokasikan		Total Program/ Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	50,424,740,716	43,020,234,676	7.404.506.040	85,32	18,464,459,716	3,280,300,000	21	37	21	37	
2020	43,879,403,822	36,859,047,285.80	7.020.356.536,2	84,01	18.294.032.000	9.581.507.000	21	34	21	34	

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)			Ket.
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	20	18,90	94,50	2,290,825,000	2,215,092,165	96.69	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	14.5	11,83	94,50	1,612,280,000	1,553,841,680	96.38	
		20	16,40	121,95				
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	33	51,3	155,5	987,070,000	950,864,500	96.33	
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	10	43	340	4,052,304,000	3,592,606,555	88.66	
		30	60	200				
		4,60	4.5*	97,83				

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
KOPERASI - RUTIN					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.183.145.017,50	4.024.922.212		
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4.183.145.017,50	4.024.922.212	96,22	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.740.508.657	3,468,364,140		
	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.490.079.908	2,336,612,115	78,51	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.250.428.749	1,131,752,025	97,74	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.327.775.000	1,561,081,214		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.086.775.000	1,226,776,814	99.05	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	241.000.000	334,304,400	99.74	
KOPERASI - PERENCANAAN					
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	911.306.492,50	894.498.198,00		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	260.850.000	258.593.800	99,14	
	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	650.456.492,50	635.904.398	97,76	
KOPERASI - KOPERASI					
5.	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	4.052.304.000	3.592.606.555	93.93	
	- Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM	314.438.000	308.486.920	98,11	
	- Kegiatan Produksi Pembiayaan dan Pemasaran	790.863.000	723.606.845	91,50	
	- Kegiatan Pengawasan Koperasi	397.003.000,00	394.781.890	99,44	
	- Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	2.550.000.000	2.165.730.900	84,93	
INDUSTRI					
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	2.290.825.000	2.215.092.165	91.52	
	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	940.000.000	915.453.250	97,39	
	- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	1.122.825.000	1.095.968.945	97,61	
	- Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	228.000.000	203.669.970	89,33	
PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG					
7.	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	987.070.000	950.864.500	86.30	
	- Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	425.264.500	418.450.600	98,40	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	240.163.400	219.222.550	91,28	
	- Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	321.642.100	313.191.350	97,37	
PERDAGANGAN - PERDAGANGAN					
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	1.612.280.000	1.553.841.680		
	- Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri	494.850.000	485.519.925	98,11	
	- Kegiatan Perdagangan Luar Negeri	544.750.000	528.960.000	97,10	
	- Kegiatan Kerjasama Perdagangan	572.680.000	539.361.755	94,18	
UPTD BPSMB					
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.358.680.987,50	1.280.582.172		
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.358.680.987,50	1.280.582.172	94,25	
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	637.518.500	575.007.419		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	637.518.500	575.007.419	90,19	
11.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	324.750.000	305.815.628		
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	284.750.000	268.826.021	94,41	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	36.989.607	92,47	
12	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	989.407.500	884.392.948		
	- Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	573.007.500	540.104.748	94,26	
	- Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	416.400.000	344.288.200	82,68	
UPTD Pelatihan Koperasi & UKM					
13.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.430.090.667,50	1.343.326.400		
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.430.090.667,50	1.343.326.400	93,93	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET.
		ALOKASI	REALISASI	%	
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	861.200.000	777.555.019		
	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	146.600.000	142.000.000	96,86	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	714.600.000	635.555.019	88,94	
15.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	319.560.000	303.641.397		
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	247.560.000	232.122.197	93,76	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.000.000	71.519.200	48,65	
16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	733.950.000	698.566.230		
	- Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	260.000.000	259.964.730	99,99	
	- Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	473.950.000	438.601.500	92,54	
JUMLAH		24.760.371.822	23.000.636.174,80	92,89	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LKj-IP Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan yang

disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dampak Covid-19. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 7 indikator yang telah ditetapkan, 3 (tiga) diantaranya diatas 100 (seratus) dan 2 (dua) lainnya diatas 90 (sembilan puluh) dan 2 (dua) indikator dengan persen dengan nilai diatas 80 (delapan puluh). Keadaan ini semakin memicu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja yang digantikan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan LKJ-IP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 memiliki tujuan (1) Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah dan (2) Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Peningkatan lapangan industri pengolahan.
- 2) Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas.

- 3) Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
 - 4) Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.
- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategik dapat dikategorikan sangat berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, 2 (dua) diantaranya dengan 3 (tiga) indikator mencapai diatas 100 (seratus) persen dan 2 (dua) diantaranya dengan 4 (tiga indikator mencapai diatas 80 (enam puluh) persen hingga 100 (seratus) persen.
 - Sasaran stategis Peningkatan usaha ekonomi koperasi dan UKM sektor produksi dengan indikator Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap PDRB pencapaiannya 97,83%, ini merupakan angka sementara. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi / capaian kinerja, sehingga secara keseluruhan didapatkan hasil 149,69 persen.

Demikian LKj-IP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.